

## KERJA SAMA UN WOMEN DENGAN GOJEK DALAM MENDUKUNG AGENDA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS-5: GENDER EQUALITY DI INDONESIA

*UN WOMEN'S Cooperation with Gojek in Supporting the Sustainable Development Agenda  
Goals-5: Gender Equality in Indonesia*

**Indah Jullanar**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
UPN "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia  
indahjullanar@upnvj.ac.id

**M. Chairil Akbar Setiawan**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
UPN "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia  
mchairilakbars@upnvj.ac.id

**Wiwiek Rukmi Dwi Astuti**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
UPN "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia  
wiwiek.rukmi@upnvj.ac.id

### INFO ARTIKEL *Article History*

**Received**  
20 July 2023

**Revised**  
28 January 2024

**Accepted**  
29 January 2024

**Keywords:**  
gender equality;  
sustainable  
development goals-5;  
cooperation; UN  
Women; Gojek.

**Kata kunci:**  
kesetaraan gender;  
tujuan pembangunan  
berkelanjutan-5, kerja  
sama, UN Women,  
Gojek.

### **Abstract**

*This article aims to describe the collaboration between UN Women and Gojek which was agreed in July 2020 in pushing for the achievement encouraging the SDGs-5: Gender Equality in Indonesia. The theory used is gender equality in the perspective of feminism, feminist institutionalism theory, and sustainable development in the type of qualitative research. Data collection was taken through internet-based research and data analysis techniques using interactive data analysis models. The results of the research show that the cooperation by UN Women and Gojek is divided into three framework areas of work namely increasing women's capacity, strengthening the capacity of MSMEs, and promoting women's safety in public spaces. The collaboration between UN Women and Gojek is shown as one of the parties involved in helping achieve the SDGs 5 agenda. This is also evidenced by data from the WEF report on the 2022 Global Gender Gap, where the gender equality index in Indonesia has increased from last year.*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi antara UN Women dan Gojek yang disepakati pada Juli 2020 dalam mendorong pencapaian SDGs-5: Kesetaraan Gender di Indonesia. Teori yang digunakan adalah kesetaraan gender dalam perspektif feminisme, teori institusionalisme feminis, dan pembangunan berkelanjutan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian berbasis internet dan teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan kerja sama UN Women dan Gojek terbagi dalam tiga bidang kerja kerangka yakni peningkatan kapasitas perempuan, penguatan kapasitas UMKM, dan peningkatan keselamatan perempuan di ruang publik. Kolaborasi UN Women dan Gojek ditampilkan sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam membantu pencapaian agenda SDGs 5. Hal ini juga dibuktikan dengan data laporan WEF *Global Gender Gap* 2022, yang indeks kesetaraan gender di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

## PENDAHULUAN

Keterlibatan perempuan semakin terlihat di berbagai bidang pada era di masa ini. Namun tidak dipungkiri perempuan juga menjadi rentan untuk menjadi korban ketidakadilan *gender*. Kemajuan dalam hak-hak perempuan dan kesetaraan *gender* memang telah dibuat dan diadopsi oleh beberapa kerangka kerja seperti *Beijing Platform for Action* atau *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Namun kemajuannya dinilai lambat, tidak merata, dan terfragmentasi. Hal itu mengakibatkan beberapa masalah struktural yang dihadapi mayoritas perempuan.

Beberapa bidang yang terkonstruksi dengan patriarki pada akhirnya seringkali menghadirkan keterbatasan bagi peluang pertumbuhan karir perempuan. Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan bekerja yang semakin luas, tapi tidak berbanding lurus dengan kesetaraan gender di Indonesia. Ketimpangan gender di sektor ketenagakerjaan masih merupakan isu yang sering terjadi. Ketimpangan ini dapat ditunjukkan dengan lebih rendahnya akses pasar kerja untuk para perempuan dibandingkan laki-laki, dan kecenderungan

upah kerja yang lebih kecil untuk perempuan dibanding dengan laki-laki.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam keberhasilan program pembangunan internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *United Nations Women* (UN Women) pada tahun 2010 sebagai entitas di bawah komando PBB yang bergerak untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Melalui UN Women, PBB menyatakan komitmennya untuk dapat mendukung kesetaraan *gender* untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, sebuah kerja sama dapat menjadi alternatif untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan khususnya SDGs Goals-5: Gender Equality (kesetaraan gender).

Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Indonesia, UN Women melihat bahwa penting untuk menciptakan peluang ekonomi yang setara. Diikuti oleh transformasi yang ke arah digital, UN Women juga berfokus pada pendekatan inovatif berbasis digital untuk dapat memulihkan ekonomi Indonesia melalui kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Berangkat dari hal tersebut, UN Women bekerja dalam kemitraan yang erat dengan pemerintah dan pihak lainnya

termasuk sektor swasta untuk mengintegrasikan kesetaraan gender (UN Women, 2020).

Salah satunya, UN Women melakukan kerja sama dengan Gojek yang merupakan perusahaan teknologi multi layanan-*on-demand* untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia (UN Women, 2020). Hal itu dilakukan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh UN Women dengan Gojek pada tanggal 7 September 2020. Kerja sama antara UN Women dengan Gojek dilakukan sebagai tujuan untuk menghadirkan berbagai macam solusi untuk dapat mencegah serta mengurangi resiko kekerasan seksual khususnya di ruang publik dengan inisiasi perempuan.

Beberapa literatur terkait *Sustainable Development Goals* khususnya kesetaraan gender di antaranya Esquivel (2016) yang melontarkan kritik mengenai agenda SDGs 2030 ditinjau dari sisi feminis yang disertai dengan rekomendasi dan saran perbaikan. Esquivel & Sweetman (2016) membahas mengenai berbagai peran pelengkap bagi hak-hak perempuan dan aktivis feminis dalam pembangunan berkelanjutan. Ayuni & Prahara (2020) mengkerucutkan pembahasan kesetaraan gender terkait dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang

diimplementasikan kepada perusahaan. Kemudian Sey (2022) mengenai kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan eksistensinya di kawasan ASEAN. Rizaldi (2022) memperlihatkan peran UN Women sebagai entitas yang mengusung kesetaraan gender sudah berjalan semestinya namun, belum cukup untuk menekan tingkat kasus kekerasan seksual perempuan di Indonesia.

Selain itu, tentang Gojek dan ojek *online* terkait dengan SDGs oleh Munandar, Efendi & Mahadika (2021) mengenai dampak transformasi *online* di Yogyakarta melalui PT Gojek Indonesia dengan menggunakan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada dampak lingkungan, ditemukan bahwa Gojek merupakan salah satu transportasi berkelanjutan. Dampak sosial menimbulkan konflik internal dan eksternal, sedangkan dampak ekonomi masyarakat terasa sangat membantu. Arofah & Alam (2019) berfokus pada eksistensi ojek *online* dan dampaknya terkait dengan SDG.

Dari uraian kasus sebagai latar belakang dan penelitian terdahulu, maka muncul rumusan masalah: “*Bagaimana kerja sama antara UN Women dengan Gojek dapat mendukung agenda SDGs-5 di Indonesia Periode 2020-2022?*” Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana peran

perusahaan sektor swasta atau aktor non-negara dalam kaitan feminisme dan kesetaraan gender. Dalam hal ini, UN Women dengan Gojek menjadi aktor utama dalam kerja sama mewujudkan agenda SDGs-5.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### Kesetaraan Gender dalam Perspektif Feminisme

Teori feminisme telah berkontribusi pada studi Hubungan Internasional (HI) dengan menilai kembali peran yang dimainkan gender dan perempuan di arena internasional, dan secara eksplisit mencatat bias gender dalam Hubungan Internasional.

Di dalam studi Hubungan Internasional feminisme merupakan sebuah pandangan alternatif. Pandangan ini menunjukkan harus adanya pembebasan akan diskriminasi yang dialami perempuan. Menurut kaum feminis, perempuan juga dapat terlibat dalam ranah internasional serta memiliki jasa dalam dunia internasional. Kaum feminis ini muncul, untuk mengubah hal-hal yang berbau dominasi kekuasaan laki-laki dengan konsep maskulinitasnya. Singkatnya, mereka ingin mencapai tatanan internasional yang mewujudkan kesetaraan gender yang ada antara perempuan dan laki-laki di dunia internasional.

### Teori Institusionalisme Feminis (*Feminist Institutionalism Theory*)

Kaum feminis menekankan bahwa neoinstitusionalisme yang ada merupakan sesuatu yang tidak memadai dikarenakan tidak memperhitungkan sifat gender lembaga (Lovenduski, 2011; Kenny, 2007). Penerapan lensa gender pada studi institusi membuat hubungan kekuasaan gender terlihat dan proses yang dapat memperkuat atau melemahkan konfigurasi tertentu (Mackay, Kenny, & Chappell, 2010).

*Feminist Institutionalism* (FI) bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam sebuah institusi dengan menekankan gender sebagai unit analisis utama (Holmes, 2020). Tujuan teori ini adalah untuk membantu aktivis feminis dan pendukungnya untuk menghilangkan bias gender serta memfasilitasi perubahan dalam menciptakan institusi yang adil gender (Lowndes, 2009).

Dengan menggunakan studi kasus kerja sama antara UN Women dengan Gojek dalam mendukung agenda SDG-5 yakni kesetaraan gender, pendekatan FI telah berkontribusi untuk menjelaskan bagaimana kesetaraan gender dapat dilakukan melalui kerja sama antar lembaga atau institusi

dengan menerapkan kebijakan institusi yang adil gender.

### **Pembangunan Berkelanjutan**

Dewasa ini, kesetaraan *gender* telah mendapatkan dorongan baru melalui *Sustainable Development*. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah salah satu konsep yang bisa dibidang multi-disiplin, sistematis, dan kompleks. Istilah Pembangunan berkelanjutan pertama kali diciptakan pada tahun 1980, tidak ada arti yang jelas mengenai pembangunan berkelanjutan namun, pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan merupakan sebuah strategi global yang ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat global (Liberatore, 2010).

Di dalam SDGs memiliki beberapa agenda penting, salah satunya adalah agenda Nomor 5 yang dikhususkan untuk kesetaraan gender dan bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan membuat semua perempuan dan anak perempuan dapat memiliki kekuatan (UNDP, 2015).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Dalam mengkaji sebuah kasus-kasus yang kontekstual dan bersifat kasuistik, metode penelitian kualitatif dianggap menjadi pilihan terbaik karena dapat mengeksplorasi lebih dalam suatu fenomena dalam studi kasus yang diteliti (Creswell, 1998). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian berbasis internet berupa data primer melalui sumber resmi dari pihak yang berkaitan dengan topik yakni UN Women dan Gojek seperti dokumen resmi, pernyataan pejabat, dan *press release* yang dikeluarkan. Sementara data sekunder didapatkan dari literatur terdahulu yang telah dipublikasi dan dapat diakses dengan mudah seperti buku, jurnal, artikel berita, laporan, dan lainnya. Kemudian teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1984) yang tercantum dalam buku Sugiyono. Model analisis data ini harus berlangsung secara interaktif dan persisten sampai selesai yang tersusun dalam tiga bagian yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification* (Sugiyono, 2013).

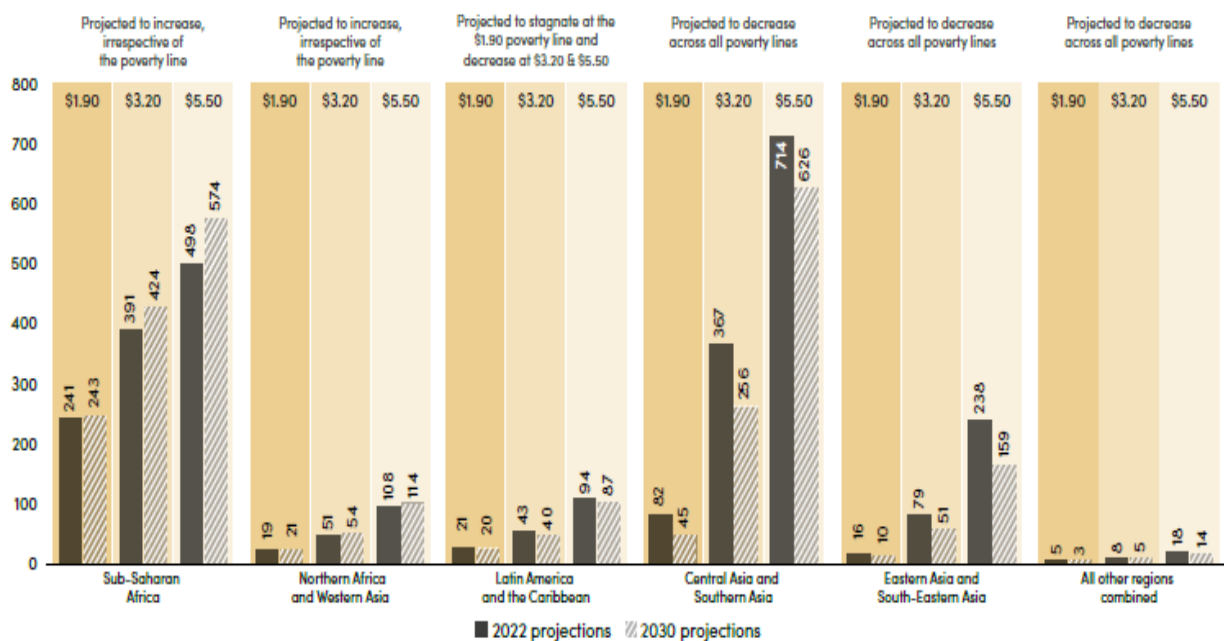
### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Perkembangan dan Kondisi Gender Equality di Indonesia

Berdasarkan laporan *Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2022* oleh UN Women,

diproyeksikan adanya kemiskinan ekstrem bagi perempuan secara global. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.

**Gambar 1. Female poverty headcount based on the \$1.90, \$3.20 and \$5.50 international poverty lines, by region, 2022 and 2030 projections (millions)**



Sumber: UN Women, UNDP and Pardee Center for International Futures using the International Futures modelling platform, 2022.

Dari data pada Gambar 1 di atas, sekitar 383 juta perempuan akan hidup dalam kemiskinan ekstrem jika dibandingkan dengan 368 juta laki-laki. Hal itu disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial sehingga tidak menjangkau untuk rumah tangga yang miskin (UN Women, 2022, p. 9).

Untuk perkembangan data terbaru mengenai SDGs-5 dari UN Women menunjukkan bahwa pada proyeksi tahun 2030 nanti, dunia sedang tidak berada di jalur yang tepat. Meskipun sudah ada berbagai kegiatan yang mendorong tercapainya kesetaraan gender seperti dengan melakukan reformasi undang-undang, menghapus

undang-undang yang diskriminatif, maupun menutup ketimpangan dalam perlindungan hukum. Namun dengan adanya Covid-19 yang memberi reaksi terhadap hak dan kesehatan seksual serta reproduksi perempuan menyebabkan penurunan dalam prospek kesetaraan gender. Kekerasan terhadap perempuan tetap berada pada jumlah yang tinggi karena kesehatan global disertai krisis iklim dan kemanusiaan telah meningkatkan resiko kekerasan pada perempuan yang dianggap paling rentan. Representasi perempuan dalam kekuasaan dan sosok pengambilan keputusan juga masih berada di bawah paritas (UN Women, 2022, p. 10).

Langkah reformasi hukum untuk perempuan bagi UN Women dinilai terlalu lambat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan juga tetap menjadi hal yang umum berdasarkan laporan data perkembangan SDG dengan indikator gender.

Menurut Esquivel dan Sweetman (2016), beberapa dasar agenda SDGs 2030 adalah hal yang memprihatinkan. Hal itu khususnya pada pemahaman agenda tentang kekuasaan dan pertumbuhan ekonomi yang hal itu juga didasari oleh peran sektor korporasi dan keuangan swasta dalam pembangunan dan peran merusak aliran

keuangan yang tidak diatur dalam ekonomi global, disaat ketidaksetaraan tumbuh sementara kepentingan elit memainkan sistem. Mereka berpendapat bahwa penting untuk memastikan pendanaan publik untuk kebijakan yang akan mewujudkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan lebih lanjut, tetapi untuk negara-negara berkembang memiliki kemampuan sangat terbatas untuk mengumpulkan uang melalui perpajakan dikarenakan oleh korupsi dan aturan globalisasi yang merugikan.

Fakta tidak adanya tantangan mendasar dalam SDGs terhadap model ekonomi pembangunan yang dikejar selama 40 tahun terakhir menuai kritik yang menyebutkan bahwa agenda 2030 tidak menyajikan strategi reformasi struktural untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Agenda 2030 dianggap gagal menyediakan lingkungan yang memungkinkan tepat serta pembiayaan yang diperlukan untuk merealisasikan hak-hak perempuan (Esquivel & Sweetman, 2016).

Pada Juli 2010, *United Nations General Assembly* membentuk UN Women untuk mengatasi tantangan ketidakadilan gender. Kehadiran UN Women berfungsi untuk mengoordinasikan serta mempromosikan kesetaraan gender sesuai

dengan sistem kerja PBB dan kesepakatan yang terkait dengan Agenda SDGs 2030.

UN Women erat kaitannya untuk mendukung SDGs-5 agar dapat terealisasi dengan cara berdiri di belakang partisipasi perempuan yang setara dalam semua sektor, dengan berfokus pada empat prioritas yang strategis. Empat prioritas itu yakni pertama, perempuan dapat memiliki jaminan pendapatan atau upah, pekerjaan yang layak dan otonomi ekonomi. Kedua, perempuan dapat memimpin, berpartisipasi atau terlibat dan mendapat manfaat yang sama dari sistem pemerintahan. Ketiga, perempuan dan anak perempuan memberikan kontribusi serta mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam membangun perdamaian dan ketahanan yang bersifat berkelanjutan, serta mendapat manfaat yang sama dari pencegahan bencana alam atau konflik dan aksi kemanusiaan. Terakhir, seluruh perempuan dan anak perempuan dapat hidup dengan bebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan (UN Women, 2023).

Berdasarkan informasi yang ada di laman resmi UN Women Indonesia, tidak berbeda jauh antara target dan capaian yang ingin diraih oleh UN Women Indonesia. Terdapat tiga sorotan utama di laman Asia Pasifik-Indonesia, yakni *Ending Violence Against Women, Women, Peace and Security*

(WPS), serta *Women's Economic Empowerment* (WEP) (UN Women Asia Pacific, 2023).

Pada awal mula tahun 2000-an, berbagai isu ketidaksetaraan gender telah berkembang luas dan menjadi topik yang populer dalam masyarakat. Pandangan perempuan sebagai komponen submisif yang tidak berdaya menjadi salah satu faktor terjadinya ketidaksetaraan *gender* ini. Adanya perbedaan dalam yang disebut *value* pada perempuan dan laki-laki berkembang menjadi budaya yang menghadirkan ketidaksetaraan gender. Mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia juga menganggap laki-laki sebagai tokoh utama dalam bertanggungjawab terhadap keluarga (Sasmita, 2005). Sedangkan perempuan yang dianggap sebagai sosok pelengkap laki-laki, pada akhirnya selalu dibanding-bandingkan dan berdampak pada pembatasan ruang gerak perempuan.

Kajian gender dengan dunia ketenagakerjaan berkaitan dengan istilah '*glass ceiling*'. Baxter dan Wright sendiri memberi definisi *glass ceiling* sebagai sebuah bentuk hambatan yang tembus pandang atau transparan untuk menghalangi wanita mendapatkan kedudukan yang setara atau lebih tinggi dari laki-laki dalam organisasi, institusi, maupun perusahaan.



Dalam hal ini, *glass ceiling* menghadirkan kesenjangan (*gap*) dalam mobilitas vertikal untuk para perempuan (Baxter & Wright, 2000). Selain itu, hal ini didukung oleh adanya survei dari Financial News pada tahun 2012 yang menyebutkan mayoritas perempuan yakni 66 persen menganggap bahwa gender merupakan sebuah hambatan dalam mencapai karier yang mereka inginkan. Kemudian pada tahun 2016 pada sumber survei yang sama, sebanyak 65 persen perempuan masih menganggap gender merugikan mereka dalam dunia kerja (Financial News, 2016).

World Economic Forum (WEF) pada tanggal 3 Juli 2022 juga sudah merilis *Global Gender Gap Report 2022*. Laporan tersebut telah mengkaji kesenjangan atau ketimpangan gender dalam empat bidang (pemberdayaan politik, partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup). Sistem skor yang digunakan WEF ialah dengan rentang skala 0-1. Skor 0 untuk memperlihatkan ketimpangan gender yang semakin besar, sedangkan skor 1 untuk memperlihatkan tercapainya kesetaraan *gender* (WEF, 2022).

**Gambar 2. Profil Ketimpangan Gender di Indonesia 2022**



Sumber: Global Gender Gap Report WEF, 2022

Berdasarkan laporan WEF tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-92 dari 146 negara dengan indeks ketimpangan *gender* 0,697. Apabila dibandingkan dengan indeks ketimpangan gender di Indonesia pada

tahun lalu, terlihat peningkatan sebesar 0,009 dari 0,688 dan Indonesia pada tahun lalu menempati peringkat ke-101 (WEF, 2022).

Indeks pemberdayaan perempuan di bidang politik merupakan skor terendah Indonesia yaitu 0,169. Skor tersebut berada di bawah rata-rata global. Kemudian disusul di bidang partisipasi dan kesempatan ekonomi Indonesia mendapatkan skor 0,674. Lalu skor Indonesia tertinggi didapatkan pada bidang pendidikan yang mendapat skor 0,972 dan bidang kesehatan berada sedikit di bawah yaitu mendapat skor 0,970. Kedua skor bidang tersebut berada di kisaran rata-rata global.

Pada tingkat nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki indikator berupa visualisasi data dan analisis data capaian SDGs di Indonesia. Berdasarkan *website* resmi Bappenas, indikator-indikator tersebut di antaranya: 5.2.2 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (15-64 tahun), 5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan 18 tahun, 5.5.2 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (dari jabatan menteri, pemerintah Eselon I, hingga pemerintah Eselon 2), 5.6.1 Proporsi

perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan, dan 5.b.1 Proporsi individu (usia > 5 tahun) yang menguasai/memiliki telepon genggam (Bappenas, 2023).

Melihat maraknya kasus yang memarjinalkan perempuan, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan gender. Selain ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984, Indonesia juga meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Indonesia juga membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan Jabatan.

Kemudian pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang secara substantif mencakupi serangkaian aturan terkait pekerja perempuan. Adapun kebijakan lainnya terkait isu gender dapat ditinjau melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs ini kemudian diadopsi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan melahirkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Peraturan inilah yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam rangka maksimalisasi kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam hal membatasi kekerasan terhadap perempuan, khususnya *online* dan *cyberbullying*, pada tahun 2008 Undang-Undang anti-pornografi disahkan di parlemen nasional. Undang-undang ini mengatur tidak hanya untuk melindungi perempuan dan gadis muda untuk dijadikan objek seks, tetapi juga mengatur mekanisme perlindungan bagi komunitas *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender* (LGBT) Indonesia. Undang-undang ini memperkuat kemajuan mereka menuju kesetaraan gender.

Selama Covid-19, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan insiden kekerasan terhadap perempuan meningkat, terutama karena terlalu banyak terpapar

internet dan perangkat teknologi. Indonesia sedang 'meningkatkan secara moderat' metrik SDGs-nya dalam hal kesetaraan gender, namun jalan masih panjang, baik secara sosial maupun politik. Negara ini bertujuan untuk mencapai tujuan kesetaraan gender pada tahun 2030.

Hasil studi Armiwulan (2021) menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan *cyber* dan *bullying* berbasis gender dengan motif untuk merendahkan harga diri mereka dan merendahkan martabat mereka, dengan kata lain, menyebabkan ketidaksetaraan gender. Hal itu memberikan dampak yang signifikan secara sosial, fisik, psikologis, dan ekonomi. Selain itu, juga menciptakan hambatan bagi agenda SDGs khususnya pada *goal 5 Gender Equality*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 1, menjelaskan bahwa pengakuan persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Namun dapat ditemukan bahwa perempuan secara universal tidak mendapatkan hak kebebasan yang sama seperti laki-laki. Perempuan khususnya yang berstatus buruh rentan terhadap eksploitasi yang hak-hak dasarnya pun tidak terpenuhi (Syafaat, 2000).

Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia berupaya melakukan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia (Harruma, 2022), melalui: (1) Peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan (salah satunya diwujudkan melalui upaya pelatihan UMKM); (2) Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan; (3) Maksimalisasi terpenuhinya target 30 persen keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif; (4) Penerapan wajib belajar 12 tahun; dan (5) Upaya peningkatan angka melek huruf (dimanifestasikan melalui pendidikan keaksaraan).

Melalui Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2000, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menyosialisasikan tentang perpektif gender. Selain itu, ditambah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (*PUG*) yang ditampilkan sejak penganggaran yakni Anggaran Responsif Gender (Ayuni & Prahara, 2020).

Sehubungan dengan persoalan kesetaraan gender dengan SDGs-5 di Indonesia, tidak terlepas dari peran dan

keterlibatan banyak pihak. Dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk dapat menciptakan kesetaraan gender. Salah satunya adalah aktor non-negara yang dalam tulisan ini memfokuskan Gojek sebagai perusahaan teknologi mengambil peran dan terlibat untuk dapat mewujudkan agenda kesetaraan gender.

### **Keterlibatan Gojek dalam Agenda Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)**

Gojek Indonesia atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dibentuk oleh Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. Diawali hanya dengan satu *call center* ojek *online*, kemudian pada tahun 7 Januari 2015 Gojek mendapat investasi dari NSI Ventures sehingga dapat memperluas cakupannya dengan membuat aplikasi ojek *online* sendiri dengan tiga layanan utama yang ditawarkan yakni *GoRide*, *GoSend*, dan *GoMart*.

Masyarakat menunjukkan minat yang tinggi terhadap moda transportasi *online* karena dinilai praktis dan mudah diakses sehingga membantu masyarakat dalam mobilitas sehari-hari. Dengan waktu yang cukup singkat, Gojek memperluas jangkauannya hingga ke berbagai kota di Indonesia dan melakukan evolusi ke arah yang lebih luas dengan memperbanyak fitur

karena respons masyarakat yang cukup baik. Tidak hanya dalam kota, pada tahun 2018 Gojek mulai masuk ke negara Vietnam dan Singapore. Pada tahun berikutnya yakni 2019, Gojek melakukan ekspansi ke Thailand dan menjadi *decacorn* pertama di Indonesia (Gojek, 2020). Tidak cukup dengan memperluas sayap, Gojek dengan Tokopedia melakukan merger dan menghadirkan identitas GoTo pada tanggal 17 Mei tahun 2021 (MZM, 2022).

Gojek memiliki visi untuk membantu memperbaiki struktur transportasi yang ada di Indonesia, memberikan akses yang mudah untuk masyarakat melakukan pekerjaan atau tugas sehari-hari dengan memakai fasilitas kurir, dan menyejahterakan kehidupan tukang ojek yang ada di Indonesia untuk kedepannya. Sedangkan misi yang diemban oleh Gojek diantaranya adalah: (1) Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia; (2) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi; (3) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial; (4) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan; (5) Menjaga hubungan baik dengan berbagi

pihak yang terkait dengan usaha ojek *online* (Suparmi, 2019).

Gojek menjadi perusahaan teknologi multi layanan pertama membuat kebijakan program pelatihan intervensi pengamat untuk mitra pengemudinya dalam awareness terhadap segala jenis pelecehan seksual di ruang publik pada tahun 2019. Masih di tahun 2019, Gojek kembali menjadi perusahaan *platform* teknologi satu-satunya dari Asia Tenggara yang diundang ke Markas Besar PBB untuk menghadiri Pertemuan Komisi Status Perempuan dan berbagi pengalaman dalam melakukan program pemberdayaan wirausahawan perempuan.

Pada tahun 2020, Gojek mendapatkan penghargaan sebagai Pemenang UN Women 2020 *Asia Pacific Women Empowerment Principles* dalam kategori Keterlibatan Komunitas dan Industri. Sejak 2020, Gojek menghadirkan inisiatif kampanye #AmanBersamaGojek sebagai bentuk komitmennya terhadap keselamatan penumpang khususnya perempuan. Inisiatif kampanye tersebut diawali saat UN Women menyelenggarakan *After Dark* dalam rangka memperingati Kampanye 16 Hari Aktivisme melawan Kekerasan Berbasis Gender pada bulan Desember.

Melalui penelitian *After Dark*, akhirnya Gojek menciptakan kampanye

#AmanBersamaGojek disertai pembangunan ‘Zona Aman’ dari tempat penampungan Gojek yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang bepergian di malam hari. Zona aman yang dibangun juga dipastikan berada di area sibuk dengan pencahayaan yang terang dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang dibutuhkan bahkan penugasan staf apabila diperlukan. Selain staf, mitra pengemudi sebelumnya juga sudah diedukasi terkait dengan memberikan ruang yang aman bagi perempuan di publik, sehingga mitra pengemudi juga dapat menjaga keamanan yang ada di zona aman (Pulse Lab Jakarta, 2020).

Pada pembahasan ini sudah memaparkan tentang kondisi kesetaraan gender yang ada di Indonesia serta keterlibatan beberapa aktor yang di antaranya adalah UN Women dengan Gojek. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa agenda SDGs-5 *Gender Equality* dapat diraih dengan alternatif kerjasama dan peran berbagai pemangku kepentingan. UN Women yang mengemban misi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan Gojek yang berkomitmen dalam pelaksanaan kesetaraan gender di kebijakan yang dikeluarkannya saling membantu dalam mewujudkan SDGs-5 *Gender Equality*.

Maka pada pembahasan berikut akan memfokuskan terhadap kerja sama antara UN Women dengan Gojek dalam mewujudkan agenda SDGs-5.

### **Kerja Sama UN Women Dengan Gojek Dalam Mendukung Agenda SDG-5**

Pada Laporan *Sustainability* Gojek tahun 2020, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menjadi area prioritas yang terkait dengan target SDGs-5. Gojek juga menandatangani *United Nations Women’s Empower Principles* pada bulan November 2020. Hal itu menempatkan Gojek pada jajaran pemimpin bisnis dari seluruh dunia yang mendorong pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (Gojek, 2020).

Masih pada laporan yang sama, tercantum bahwa Gojek berkomitmen untuk menghapuskan segala macam diskriminasi dan pelecehan serta menyediakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi pengguna dan mitra. Gojek bahkan menyertakan kebijakan anti pelecehan ke dalam kode etiknya sebagai dukungan kebijakan yang tidak menoleransi bentuk pelecehan di lingkungan kerja.

Pada tanggal 7 September tahun 2020, laman resmi UN Women *Asia and the Pacific* meluncurkan berita kesepakatan kolaborasi antara UN Women Indonesia dengan

perusahaan Gojek. Penandatanganan MoU antara UN Women dengan Gojek mencakup adanya tiga bidang kerja utama. Secara garis besarnya adalah melakukan pengembangan kapasitas perempuan dan berbagi pengetahuan, merumuskan kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan kapasitas UMKM, dan mempromosikan keselamatan perempuan di ruang publik termasuk dengan memastikan partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan sehari-hari di ruang publik (UN Women, 2020).

#### *Pengembangan Kapasitas Perempuan dan Berbagi Pengetahuan*

Pada tahun 2021, Gojek kembali meraih juara pertama kategori *Transparency and Reporting category of the UN's Women's Empowerment Principles (WEP) Awards Indonesia 2021*. Acara penghargaan ini diselenggarakan oleh *WeEmpowerAsia*, sebuah program UN Women yang didanai dan bekerja sama dengan Uni Eropa.

Pada April tahun 2021, Gojek juga terlibat dalam misi PBB yang bertajuk *No Manel Pledge* yang diinisiasi oleh PBB untuk mengakhiri fenomena *All-Male Panels (Manel)*, yang suatu panel semuanya beranggotakan laki-laki sehingga terciptanya ruang inklusif bagi semua gender. Gojek

menjadi perusahaan Indonesia sekaligus penandatanganan *Women Empowerment Principles* pertama yang bergabung dalam kegiatan tersebut. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Gojek akan membuka kesempatan bagi narasumber perempuan untuk berpartisipasi dalam setiap diskusi yang diprakarsai perusahaan, sekaligus mendorong penyelenggara diskusi publik untuk menekankan keberagaman gender (The Jakarta Post, 2021).

Sebagai perusahaan teknologi dengan komitmen tinggi untuk menciptakan dampak sosial yang positif, Gojek juga secara aktif mempromosikan kesetaraan dan keberagaman gender di dalam perusahaan. Gojek meluncurkan *Women@Gojek* sebagai kelompok sumber daya karyawan yang dipimpin oleh karyawan Gojek. *Women@Gojek* memungkinkan karyawan perempuan untuk mengembangkan potensi mereka melalui pelatihan, kolaborasi, dan diskusi, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan inklusivitas di tempat kerja (The Jakarta Post, 2021).

Selain *Women@Gojek*, pada bulan November tahun 2021 grup GoTo juga mengadakan konferensi virtual *START Summit Women in Tech* sebagai *platform* para pemimpin dalam berbagi pengalaman mengenai penanganan kesenjangan gender

dan meningkatkan kesetaraan gender di sektor perusahaan teknologi (GoTo, 2021).

Berbagai pelatihan usaha bisnis baik digital maupun fisik bagi wirausaha perempuan oleh Gojek dan UN Women menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan representasi perempuan dalam sektor tenaga kerja khususnya teknologi industri. Dengan berwirausaha, perempuan dapat memegang posisi kepemimpinan tertinggi dan peluang untuk memperluas bisnis apabila sudah berjalan stabil. Pelatihan dari UN Women dengan Gojek terkait dengan digitalisasi dan *E-Commerce* juga berperan dalam memberantas terjadinya kasus-kasus kekerasan dan pelecehan *online*.

Pada bidang kerja ini, dihadapi sebuah tantangan untuk dapat mengedukasi masyarakat agar dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam mewujudkan agenda kesetaraan gender. Berbagai *platform* berbagi pengetahuan dilakukan mayoritas secara daring karena adanya pandemi Covid-19. Hal itu menyebabkan tidak semua partisipan dapat bertemu secara langsung dan berbagi pengetahuan secara luring.

### *Penguatan Kapasitas UMKM*

Kolaborasi antara Gojek dengan UN Women tahun 2021 berfokus pada pemahaman tantangan yang dihadapi

UMKM milik perempuan yang ada pada ekosistem GoTo (GoTo, 2021). UN Women dengan Gojek melakukan banyak pelatihan bagi UMKM milik perempuan untuk dapat mengembangkan bisnis mereka terutama saat pandemi yang membatasi mobilitas masyarakat. Bisnis digital disarankan sebagai salah satu alternatif untuk tetap mendapatkan penghasilan secara stabil, adapun bisnis digital tersebut dapat bermitra dengan fitur Gojek yakni GoFood untuk makanan dan GoMart untuk toko (GoTo, 2021).

Salah satu program edukasi Gojek terhadap UMKM adalah kelas Bincang Bisnis yang diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2022 di Solo. Kelas tersebut bertujuan untuk mendukung ketahanan UMKM kuliner terhadap tantangan yang muncul akibat pandemi Covid-19.

Gojek dan *GoTo Financial* juga melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), UN Women, dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) untuk mendukung pemberdayaan perempuan Indonesia melalui program 'Perempuan Berdaya, Indonesia Jaya'. Program tersebut direalisasikan dengan rangkaian pelatihan yang dirancang berlandaskan tiga pilar edukasi. Tiga pilar tersebut adalah perencanaan bisnis,



pemahaman *gender* dalam wirausaha, dan pengembangan bisnis. Adapun kolaborasi dari banyak pihak ini memiliki tujuan untuk dapat memberdayakan dan menguatkan peran perempuan dalam sektor wirausaha khususnya kewirausahaan digital (Silawati, 2022).

Pada bidang kerja penguatan UMKM juga terdapat kendala yang sama dengan bidang kerja sebelumnya, yakni aktifitas yang dilakukan mayoritas secara *online*. Kegiatan pelatihan yang dilakukan secara *online* tentunya tidak semaksimal apabila dilakukan secara tatap muka langsung. Dengan hal ini, kegiatan pelatihan yang dilaksanakan tidak terasa maksimal dan tidak secara penuh memenuhi target audiens UMKM.

#### *Promosi Keselamatan Perempuan di Ruang Publik*

Mandat UN Women sebagai pihak yang mengonsolidasikan promosi kesetaraan gender memiliki peran penting dalam memberantas segala jenis kekerasan dan pelecehan seksual perempuan di ruang publik. Sedangkan Gojek sebagai salah satu perusahaan teknologi yang populer di kalangan masyarakat, ikut turut membantu dengan memberikan pengaruh perlindungan bagi perempuan di ruang publik. Hal itu

didasari oleh ruang lingkup Gojek yang mobilitasnya bersifat dinamis dan mayoritas mitra serta pelanggannya berada di ruang publik.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan, yang bersamaan dengan peringatan *International Women Day* pada tanggal 8 Maret 2021, Gojek dengan UN Women mengadakan pelatihan dalam rangka peningkatan standar untuk tim unit darurat. Pelatihan tersebut menerapkan standar keamanan tertinggi di industri melalui kemampuan Tim Unit Darurat dalam menangani laporan terkait kekerasan seksual dengan pelatihan yang dijalankan secara berkala atau disebut *refresher training*. Tim unit darurat yang dibentuk ditugaskan untuk dapat menerima berbagai laporan dan melakukan penerapan prinsip fundamental dalam menangani kasus yang dilaporkan diantaranya menciptakan adanya rasa yang aman kepada pelapor melalui empati, tidak menyalahkan korban, tidak menghakimi, menghargai perbedaan latar belakang, membangun hubungan yang setara, dan memberdayakan korban dengan memberi informasi yang berguna (Zuhriyah, 2021). Pelatihan yang diberikan UN Women kepada Tim Unit Darurat Gojek juga menekankan pada pentingnya aspek pembentukan budaya serta pengetahuan dari berbagai pihak yang

berperan dalam membantu korban kekerasan seksual (Rochman, 2021).

Selanjutnya, kerja sama lainnya antara Gojek dan UN Women adalah berupa pengadaan pelatihan anti-kekerasan seksual bagi mitra pengemudi (*driver*). Pelatihan ini telah berjalan sejak sebelum pandemi di delapan kota besar yakni Jakarta, Bandung, Palembang, Bali, Medan, Yogyakarta, Malang dan Manado. Sehingga pada tahun 2022, Gojek memiliki target untuk melaksanakan pelatihan mitra pengemudi di sepuluh kota. Kota-kota tersebut adalah Makassar, Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Solo, Bandung, Surabaya, dan Denpasar (Suyudi, 2022). Pada pelatihan yang menerapkan tatap muka secara langsung, mitra pengemudi Gojek diberi edukasi mengenai kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual, serta dampaknya secara mendalam. Selain itu, mitra pengemudi juga dilatih cara membantu korban kekerasan seksual dengan metode *active bystander* atau intervensi saksi (Kontan.id, 2022).

Bidang kerja ini memiliki tantangan dalam mengurangi kasus kekerasan dan pelecehan seksual perempuan di ruang publik. Dengan mempromosikan keselamatan perempuan di ruang publik, UN Women dengan Gojek mencoba mengambil

kepercayaan publik untuk meyakinkan bahwa publik seharusnya menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Namun, kasus pelecehan dan kekerasan seksual perempuan masih marak terjadi di ruang publik khususnya di daerah yang sepi dan rawan, sehingga masih perlu promosi edukasi tentang keselamatan perempuan di ruang publik secara menyeluruh.

### **Kerja Sama antara UN Women dengan Gojek dalam Perspektif Feminisme dan *Feminist Institutionalism***

Dilihat dari kacamata FI, perusahaan Gojek sudah berhasil dalam menerapkan kebijakan gender. Dengan memberikan peluang yang setara bagi perempuan untuk bekerja maupun menjadi pelaku ekonomi dan memberikan ruang yang aman bagi perempuan di publik menjadikan Gojek sebagai institusi yang memiliki kebijakan adil gender. UN Women sebagai badan PBB yang bertujuan mengangkat isu kesetaraan gender, berjalan sesuai dengan peran dan tujuan yang diembannya. Kemitraan UN Women Indonesia dengan Gojek selaras dengan fokus tujuan yang sebelumnya dibahas untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. MoU antara UN Women dengan Gojek juga memang

dilakukan atas dasar komitmen pemenuhan hak-hak perempuan di seluruh aspek.

Dampak dari adanya penerapan kebijakan gender yang adil, sangat berpengaruh terhadap indeks kesenjangan gender. Terbukti dengan data dari WEF mengenai laporan *Global Gender Gap 2022*, indeks kesetaraan gender di Indonesia meningkat. Peningkatan yang dicapai oleh Indonesia diraih dalam semua bidang dengan urutan yang paling tinggi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan terakhir ditempati oleh bidang politik. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi kesetaraan gender yang dipromosikan oleh kerja sama antara UN Women dengan Gojek menjadi salah satu penyumbang kenaikan hal tersebut. Secara tidak langsung kerja sama ini telah ikut berperan dalam meningkatkan indeks kesetaraan gender di Indonesia dalam bidang pendidikan dan ekonomi bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan data laporan dari WEF.

Dari sudut pandang feminisme, kondisi di Indonesia masih jauh dari pencapaian penuh kesetaraan gender. Namun, Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa regulasi hukum untuk menunjukkan adanya kesetaraan gender salah satunya UU No. 13 tahun 2003 tentang kesetaraan gender di dalam dunia ketenagakerjaan. Berdasarkan

hal ini, kerja sama antara UN Women dengan Gojek menjadi salah satu alternatif untuk membuka seluruh peluang dan memberi kesempatan yang sama bagi pekerja perempuan untuk dapat menjadi pelaku ekonomi atau mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor, khususnya pada sektor pengemudi ojek *online* dan wirausaha.

Hubungan antara gender dan institusi dalam perusahaan Gojek juga terlihat sangat jelas dibuktikan dengan beberapa media yang memberitakan mengenai komitmen Gojek dalam memperjuangkan perempuan mendapatkan hak penuh dan kesempatan setara yang juga dikonfirmasi langsung oleh Gojek melalui laman resminya. Dalam kaitan *Feminist Institutionalism*, hubungan kekuasaan *gender* yang diterapkan dalam kebijakan Gojek pada akhirnya menguatkan konfigurasi perusahaan Gojek sebagai perusahaan yang ramah terhadap perempuan dan aktif dalam kampanye kesetaraan gender sehingga mengajak seluruh masyarakat untuk dapat berjuang bersama memberantas diskriminasi gender. Feminisme awal melihat dasar penyebab ketidaksetaraan gender secara makro, sebagai sistemik dan bersifat struktural. Bahkan dalam lensa negara, feminisme awal berpendapat bahwa patriarki dan kekuatan laki-laki dilembagakan. Kehadiran Gojek beserta komitmen penuh

terhadap hak-hak perempuan mematahkan anggapan awal tersebut.

Berdasarkan pernyataan Lowndes (2009), Tujuan teori FI telah tercapai melalui kerja sama UN Women dengan Gojek karena dapat menghilangkan bias *gender* dan memfasilitasi perubahan dalam menciptakan lembaga atau institusi yang adil gender melalui kebijakan dan program yang dibuatnya. Berdasarkan laporan *sustainability* Gojek tahun 2020 dan laporan berkelanjutan GoTo tahun 2021, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu target dan area prioritas Gojek. Hal itu membuktikan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memang menjadi salah satu hal utama yang Gojek terapkan sebagai inisiatif untuk menciptakan lingkungan keberagaman gender dan inklusif untuk semua kalangan.

Tidak hanya mencapai tujuan dari teori feminis dan FI, kerja sama antara UN Women dengan Gojek juga turut berkontribusi dalam mendukung tercapainya SDGs 5. Dari laporan *sustainability* Gojek tahun 2020 dan laporan berkelanjutan GoTo tahun 2021, SDGs digunakan untuk menyelaraskan upaya Gojek dan memantau bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan global. SDGs 5: *Gender Equality* adalah salah satu target yang

dijadikan Gojek sebagai landasan pendekatan dan inisiatif utama dalam setiap kebijakan dan aktivitasnya (Gojek, 2020).

## SIMPULAN

Kerja sama antara UN Women dengan Gojek hadir sebagai salah satu pihak yang ikut serta mendukung kesetaraan gender di Indonesia, meskipun data dari UN Women menunjukkan bahwa secara global kemajuan SDG 5 di seluruh aspek masih jauh dari target. Dibuktikan dengan pernyataan laporan *sustainability* Gojek yang menyatakan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang menjadi area prioritas sebagai landasan dalam ekosistem yang dijalankan. Selain itu, Gojek menandatangani UN Women's *Empower Principles* pada November 2020 dan disusul menjadi juara pertama *Transparency and Reporting category of UN's Women's Empowerment Principles Awards* Indonesia pada tahun 2021.

Adapun data peningkatan kesetaraan gender di Indonesia tentu harus ditafsirkan secara hati-hati. Dalam hal kerja sama antara UN Women dengan Gojek berperan dalam peningkatan tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Program-program pemberantasan diskriminasi dan kekerasan

terhadap perempuan serta pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh UN Women dengan Gojek selaras dengan pendekatan *sustainability* yang diterapkan Gojek untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik menuju kesetaraan gender.

Ketercapaian UN Women dengan Gojek dalam mendorong agenda SDGs-5 juga sesuai dengan tujuan dari teori feminis dan FI yang berorientasi terhadap penerapan kebijakan institusi yang berdampak pada kesetaraan gender. Meskipun berdasarkan data Gojek bahwa porsi perempuan pada struktur kepemimpinan Gojek menurun sebanyak 1,7 persen periode 2020-2021, hal itu tidak menyembunyikan fakta bahwa Gojek masih berupaya dalam mengadvokasi perempuan untuk mengambil posisi kepemimpinan melalui beberapa kebijakannya.

Kerja sama antara UN Women dengan Gojek telah selaras dengan indikator kinerja *Environment, Social, and Governance* (ESG) dalam mendorong tercapainya agenda SDGs *Goal-5* yang tercantum dalam Laporan *Sustainability* Gojek. Hal ini dibuktikan dari korelasi antara laporan perkembangan atau kemajuan indikator gender SDGs oleh UN Women dengan relevansi program UN Women dengan Gojek. Adanya kerja sama ini berperan dalam meningkatkan langkah

Indonesia untuk mencapai agenda SDG-5 meski tidak secara cepat namun cukup untuk memberi dampak terhadap publik. Untuk dapat memaksimalkan kerja sama yang sudah dilakukan, alangkah baiknya dari pihak UN Women maupun Gojek memperbanyak kegiatan yang bersifat tatap muka alih-alih secara virtual atau daring. Keterlibatan langsung dapat meningkatkan partisipasi perempuan secara penuh dan peningkatan citra Indonesia yang lebih baik dalam kesetaraan gender.

Penulis berharap bahwa kerangka kerja sama antara UN Women dengan Gojek ke depannya dapat berjalan dengan maksimal dan meluncurkan banyak inovasi-inovasi baru dalam program yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender. Selain itu, dengan adanya kerja sama yang sudah dilakukan oleh UN Women dengan Gojek untuk mendukung agenda SDGs-5, penulis berharap banyak kerja sama antar institusi lainnya yang dapat ikut membantu dalam pelaksanaan pencapaian agenda SDGs khususnya SDGs-5 yang masih jauh dari kata pencapaian penuh. Untuk dapat mencapai target SDGs-5 sesuai dengan misi UN Women, perlu adanya keterlibatan secara maksimal baik dari pemerintah, masyarakat, maupun institusi lokal ataupun internasional. Segala

partisipasi sangat berperan untuk meningkatkan indikator kesetaraan gender yang ada di Indonesia.

## REFERENSI

- Armiwulan, H. (2021). Gender-Based Cyber Violence: A Challenge to Gender Equality in Indonesia. *International Journal of Cyber Criminology Vol. 15(2)*, 102–111.
- Arofah, A. F., & Alam, Y. T. (2019). Eksistensi Driver Ojek Online Wanita Sebagai Bentuk Kesetaraan Gender. *5(2)*, 171-183. doi:doi.org/10.33369/jsn.5.2.171-183
- Ayuni, D. S., & Prahara, R. S. (2020). PSAK 24 : Gender Equality in Sustainable Development Goals. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Vol. 02 No. 01*, 60-68.
- Bappenas. (2023, July 17). *Indikator SDGs*. Retrieved from Dashboard SDGs Indonesia: <https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/>
- Baxter, J., & Wright, E. O. (2000). The Glass Ceiling Hypothesis: A Comparative Study of the United States, Sweden, and Australia. *Sage Journal Vol. 14*.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications.
- Esquivel, V. (2016). Power and the Sustainable Development Goals: a feminist analysis. *Gender & Development*, 9-23.
- Esquivel, V., & Sweetman, C. (2016). Gender and the Sustainable Development Goals. *Gender & Development Vol. 24*, 1-8.
- Gojek. (2020). *Laporan Sustainability*. Jakarta: Gojek.
- GoTo. (2021). *Laporan Berkelanjutan*. Jakarta: GoTo Company.
- Harruma, I. (2022, November 27). *Upaya Pemerintah Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/00000091/upaya-pemerintah-meningkatkan-pemberdayaan-perempuan>
- Holmes, G. (2020). Feminist Institutionalism. In *United Nations Peace Operations and International Relations Theory*. Manchester: Manchester University Press.
- Kenny, M. (2007). Gender, Institutions and Power: A Critical Review. *Politics 27(2)*, 91-100.
- Kontan.id. (2022, September 13). *Perkuat Keamanan Ekosistem, Gojek Edukasi Mitra Driver Ciptakan Ruang Publik Aman*. Retrieved from [pressrelease.id: https://pressrelease.kontan.co.id/news/perkuat-keamanan-ekosistem-gojek-edukasi-mitra-driver-ciptakan-ruang-publik-aman](https://pressrelease.kontan.co.id/news/perkuat-keamanan-ekosistem-gojek-edukasi-mitra-driver-ciptakan-ruang-publik-aman)
- Liberatore, A. (2010). International Cooperations and Sustainable Development. *Peace Studies, Public Policy And Global Security – Volume V*, 342-353.
- Lovenduski, J. (2011). Foreword.” In *Gender, Politics and Institutions: Towards a Feminist Institutionalism*.

- In M. L. Krook, & F. Mackay, *Foreword.*” In *Gender, Politics and Institutions: Towards a Feminist Institutionalism* (pp. vi-xi). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Lowndes, V. (2009). New institutionalism and urban politics. *Theories of Urban Politics*, 91-105.
- Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. (2010). New Institutionalism Through a Gender Lens: Towards a Feminist Institutionalism? *International Political Science Review* 31 (5), 573-588.
- Munandar, A., Efendi, D., & Mahadika., A. (2021). Aris Munandar, David Efendi Alam Mahadika “Impact of Online Transformation In Yogyakarta: PT Gojek Indonesia Through The Concept Of SDG Approach”. *Sustainability: Theory, Practice and Policy*, 1(2), 216-232.
- MZM. (2022, Mei 22). *Profil Perusahaan Gojek sebagai Salah Satu Startup Unicorn di Indonesia*. Retrieved from Berita Terkini Kumparan: <https://kumparan.com/berita-terkini/profil-perusahaan-gojek-sebagai-salah-satu-startup-unicorn-di-indonesia-1y7JuKK8bMb/full>
- Pulse Lab Jakarta. (2020, April 1). *Translating “After Dark” Recommendations into Action: Gojek Creates Safe Zones for Women in Transit*. Retrieved from <https://medium.com/pulse-lab-jakarta/translating-after-dark-recommendations-into-action-gojek-creates-safe-zones-for-women-in-transit-ffb0545ce579>
- Rizaldi, S. S. (2022). *Peran United Nations Women Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia 2015 – 2018*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
- Rochman, F. (2021, Maret 8). *UN Women apresiasi Gojek dalam berikan perlindungan kepada perempuan*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/2031850/un-women-apresiasi-gojek-dalam-berikan-perindungan-kepada-perempuan>
- Sasmita, I. (2005). *Jurnal Perempuan 44: Pendidikan Alternatif Untuk Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sey, A. (2022). Gender Security and Safety in the ASEAN Digital Economy. *ERIA Discussion Paper Series*.
- Silawati. (2022, Juli 14). *Grup Goto Gandeng KemenPPPA dan UN Women, Dukung Perempuan Bangkit*. Retrieved from <https://swa.co.id/swa/trends/grup-goto-gandeng-kemenpppa-dan-un-women-dukung-perempuan-bangkit>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmi. (2019). *Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Driver Gojek Di Area Kampus Uin Raden Fatah Palembang)*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Suyudi, T. (2022, April 1). *Gojek Gelar Pelatihan Anti Kekerasan Seksual*. Retrieved from It Works:

- <https://www.itworks.id/49233/gojek-buat-pelatihan-anti-kekerasan-seksual-untuk-mitra-pengemudi.html>
- Syafaat, R. (2000). *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Azasi Manusia*. Malang: UM Press.
- The Jakarta Post. (2021, 4 25). *Gojek becomes first Indonesian company to support UN initiative in ending all-male panels*. Retrieved from The Jakarta Post:  
<https://www.thejakartapost.com/ms/gojek-2019/2021/04/25/gojek-becomes-first-indonesian-company-to-support-un-initiative-in-ending-all-male-panels.html>
- UN Women. (2020, 9 4). *UN Women and Gojek Collaborate to Enhance the Economic Empowerment of Women in Indonesia*. Retrieved from <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/09/un-women-and-gojek-collaborate---indonesia>
- UN Women. (2022). *Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2022*. United States: UN Women and United Nations Department of Economic and Social Affairs,.
- UN Women. (2023). *About UN Women*. Retrieved from UN Women: <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- UN Women Asia Pacific. (2023). *UN Women Indonesia*. Retrieved from UN Women Asia Pacific: <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/indonesia>
- UNDP. (2015, 9 28). *Sustainable Development Goals Booklet*. Retrieved from United Nations Sustainable Development Goals: [https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs\\_Booklet\\_Web\\_En.pdf&ved=2ahUKEwjtuaCOw8j1AhUA8XMBHcowDhEQFnoECCEQAQ&usq=AOvVaw1gJz7VYHrZc\\_cPzfEw4DOI](https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf&ved=2ahUKEwjtuaCOw8j1AhUA8XMBHcowDhEQFnoECCEQAQ&usq=AOvVaw1gJz7VYHrZc_cPzfEw4DOI)
- WEF, W. E. (2022). *Global Gender Gap Report 2022*. Geneva: World Economic Forum.
- Zuhriyah, D. A. (2021, 3 8). *Gojek-UN Women Lindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual #AmanBersamaGojek*. Retrieved from TrenAsia: <https://www.trenasia.com/gojek-gandeng-un-women-berikan-pelatihan-untuk-tim-unit-darurat>